RKUD Lebak Pindah ke Bank Banten, Penerimaan Pendapatan Daerah Masih ke bjb

written by Kabar 6 | 25 Juli 2024



Kabar6-Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Lebak dari Bank Jabar Banten (bjb) telah dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak ke Bank Banten.

Meski pengelolaan RKUD sudah berpindah ke bank yang diresmikan pada 29 Juli 2016, namun khusus untuk penerimaan pendapatan daerah masih menggunakan rekening bjb.

"Untuk memastikan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi, Bapenda dan beberapa perangkat daerah pengelola retribusi masih menggunakan rekening yang sudah dikerjasamakan oleh bjb. Sesuai kerja sama yang dibangun kembali dengan bjb, pengistilahnya diubah menjadi rekening atas bank persepsi penerimaan pendapatan daerah," kata Kepala Bapenda Lebak, Doddy Irawan, Kamis (25/7/2024).

**Baca Juga: <u>Penandatanganan Kerjasama Pemkot Serang dengan</u>
<u>Bank Banten Munculkan Drama, Kepala BPKAD Tak Hadir</u>

Doddy menerangkan, perubahan tersebut tidak akan menggangu

pelayanan masyarakat atau pengelola retribusi yang akan menyetor untuk pendapatan daerah

"Wajib pajak masih bisa menggunakan akses apapun karena sistem dan polanya masih dengan bjb. Adapun transfer dari bank persepsi sudah diatur dan disepakati mengikuti kebijakan perbankan dan pedoman pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah," ujar Doddy.

Pengalihan rekening layanan penerimaan pendapatan daerah akan dilakukan setelah Bank Banten dipastikan siap dalam menyiapkan perangkat dan fasilitas agar pelayanan pajak dan retribusi tidak tetap berjalan seperti sebelumnya.

"Kembali kepada pelayanan masyarakat kondisi tersebut harus kami pastikan bisa bertransisi dengan baik. Jadi kami memandang masih perlu tidak mengubah kebijakan yang sudah terbangun dengan Bank bjb," terang Doddy.

Doddy menjelaskan, tidak ada target kepada Bank Banten kapan proses transisi pelayanan tersebut bisa mulai dilaksanakan.

"Tidak ada kalau terkait target waktu, tapi kami menyampaikan secara spesifik soal bagaimana sistem, fasilitas maupun perangkat yang dibutuhkan. Contoh sistem ISO yang sudah terbangun untuk menjaga data dan alur pembayaran berjalan baik, aman dan lancar," tuturnya.

"Itu tinggal nanti Bank Banten secepat apa menyesuaikan dan beradaptasi dari kondisi yang sudah berjalan dengan bjb," tambah Doddy.

Lebih lanjut Doddy mengaku, pihak bersama Bank bjb dan Bank Banten sudah membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi saat proses transisi pelayanan tersebut.

"Itu yang kami harus antisipasi dan diminimalisir agar tidak ada permasalahan dalam prosesnya nanti," katanya.(Nda)

Bayar PBB di Tangsel pada Januari-April 2024 Diskon 10 Persen

written by Kabar 6 | 25 Juli 2024



Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan potongan atau diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan PBB sebesar Rp 435 miliar.

"Diskon 10 persen kalau bayarnya dari Januari sampai April," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel, Moch Taher Rochmadi di Serpong, Selasa (30/1/2024).

Sedangkan pembayaran PBB mulai Mei hingga Juni diberikan diskon 5 persen dari ketetapan nilai PBB tahun 2024 berjalan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat wajib pajak.

"Kita mau menyosialisasikan setiap batas akhir 31 Agustus," terang Taher. Menurutnya, sistem pembayaran PBB di Kota Tangsel ini lebih dipermudah.

Bayar PBB, lanjut Taher, bisa langsung ke bank seperti BCA, BJB, minimarket. Bahkan lewat handphone pribadi pun bisa asalkan punya aplikasi m-banking, QRIS atau e-commerce.

**Baca Juga: <u>Tahun Anggaran 2024, Target Penerimaan PBB di</u> <u>Tangsel Rp 435 Miliar</u>

Taher bilang, masyarakat wajib pajak cukup memasukkan dan atau menyebutkan Nomor Obyek Pajak (NOP). "Dari ponsel bisa masukan NOP terus dibayarkan," jelasnya.

Taher bilang, jika sudah melunasi <u>PBB</u> lewat bank, minimarket dan atau e-commerce tapi masyarakat membutuhkan tanda bukti bayar hardcopy bisa datang langsung ke kantor pelayanan Bapenda Tangsel di Cilenggang, Kecamatan Serpong.

Pemerintah Kota Tangsel pada Tahun Anggaran 2024 ini telah menetapkan postur APBD sebesar Rp 4,18 triliun lebih. Pendapatan asli daerah dipatok sebanyak Rp 2 triliun di antaranya diperoleh dari PBB yang dibayarkan oleh masyarakat wajib pajak.(yud)

Yuk Merapat! bjb Buka Layanan Tukar Uang di Alun-alun Rangkasbitung

written by Editor2 - | 25 Juli 2024



Kabar6-Bank bjb akan membuka layanan penukaran uang pecahan kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri 1444 H, di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Manajer Operasional bank bjb Cabang Rangkasbitung Rina Triana layanan penukaran uang pecahan kecil di alun-alun dibuka pada hari Senin, 17 April 2023.

"Insya Allah layanan penukaran uang di Alun-alun Rangkasbitung dimulai pukul 09.00 WIB," kata Rina, Kamis (13/4/2023).

Layanan penukaran uang juga dilakukan oleh pihak Bank Indonesia (BI) di lokasi yang sama. Berbeda dengan BI, Rina menuturkan, masyarakat yang melakukan penukaran uang lewat bjb tidak perlu melakukan pendaftaran secara online.

"Kalau penukaran di kami, masyarakat tidak ada pendaftaran online, jadi siapkan saja uang yang akan ditukar. Kami melayani sampai uang yang tersedia habis," ujar Rina.

Rina menuturkan, setiap orang yang akan menukar uang dibatasi. Per orang masing-masing denominasi satu gepok. **Baca Juga: <u>Mobil Lupa Dikunci</u>, <u>Uang Setoran Ayam Rp 114 Juta</u>
Raib di Panongan

"Denominasi Rp20 ribu harus Rp2 juta, denominasi Rp Rp10 ribu harus Rp1 juta dan seterusnya," terangnya.

Untuk pecahan Rp75 ribu mendapatkan satu gepok senilai Rp7,5 juta, pecahan Rp50 ribu mendapat satu gepok senilai Rp5 juta, pecahan Rp20 ribu mendapat satu gepok senilai Rp2 juta, pecahan Rp10 ribu mendapat satu gepok senilai Rp1 juta, pecahan Rp5 ribu mendapat satu gepok senilai Rp500 ribu, pecahan Rp2 ribu mendapat senilai Rp200 ribu, dan pecahan Rp1 ribu mendapat satu gepok senilai Rp100 ribu.

Dikatakan Rina, bjb sejak Senin lalu telah melayani penukaran uang pecahan di teller kantor cabang maupun kantor cabang pembantu (KCP). Namun layanan di teller hanya dikhususkan bagi para nasabah bjb.

"Iya hanya untuk nasabah saja, sementara untuk masyarakat umum kami buka di alun-alun tanggal 17. Untuk di kantor cabang sudah habis, sementara di KCP ada yang beberapa yang sudah habis dan belum," tutur Rina.(Nda)

Minyak Goreng Murah bjb Laris Manis Diburu Warga di Pasar Murah Lebak

written by Kabar 6 | 25 Juli 2024



Kabar6-Sebanyak 420 pcs minyak goreng kemasan ukuran 2 liter di pasar murah Ramadan Kabupaten Lebak diserbu masyarakat, Kamis (6/2/2023).

Ratusan liter minyak goreng dalam kemasan itu disediakan oleh bank bjb dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Minyak goreng kemasan 2 liter yang dijual hanya Rp20.000 tersebut langsung laris manis dibeli masyarakat yang didominasi ibu-ibu.

Untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut, pembayarannya harus dilakukan melalui QRIS, Digi Mobile Digi Cash.

"Bank bjb memberikan harga discount minyak goreng setengah harga normal untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan minyak goreng, khususnya di bulan Ramadan," kata Manager Operasional bank bjb Cabang Rangkasbitung, Rina Triana di lokasi.

Baca Juga: <u>Mulai H-7 Lebaran Kereta Api Hanya Sampai Stasiun</u> <u>Kota Cilegon</u>

Tentu bukan tanpa alasan mengapa bjb mendorong pembayaran minyak goreng murah tersebut melalui QRIS bjb Digi Cash. Rina menyebut, hal ini untuk meningkatkan inklusi keuangan kepada

masyarakat melalui digitalisasi perbankan.

"Sekaligus kami juga mengedukasi masyarakat bahwa saat ini metode pembayaran menggunakan scan barcode lebih mudah, simple, dan cepat tanpa harus membawa uang cash," terang Rina.

Dikatakan Rina, bjb terus mendorong masyarakat agar dapat menggunakan QRIS untuk keperluan setiap transaksi. Sosialisasi terus menerus dilakukan.

"Nasabah bjb yang sudah aktif bjb Digi dan bisa bertransaksi menggunakan QRIS sebanyak 30.831 nasabah. Kalau dilihat 3 bulan terakhir nasabah yg bertransaksi menggunakan QRIS mencapai 6.636 orang, dan mudah-mudahan bisa semakin banyak," harap Rina.(Nda)

bjb Jemput Bola di Pelantikan Apdesi Lebak, Bantu Kades Aktivasi Mobile Banking

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Bank bjb melakukan jemput bola dengan pelayanan aktivasi DIGI Mobile kepada kepala dan perangkat desa yang hadir di acara pelantikan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lebak periode 2022-2027, di Hall Latansa Mashiro, Rangkasbitung, Sabtu (27/8/2022).

"Jadi enggak perlu aktivasi ke bank karena langsung kami aktivasi di lokasi," kata Manager Operasional bank bjb Kantor Cabang Rangkasbitung, Rina Triana.

Langkah bjb ini juga sekaligus mendorong para aparatur pemerintah desa supaya dalam melakukan setiap transaksi secara digital melalui smartphone tanpa harus repot-repot datang ke bank.

"Pegawai lebih kekinian, lebih mengenal digital. Jadi enggak usah datang ke bank karena bisa via mobile banking bjb DIGI,"

terang Rina.

Rina menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi di wilayah Provinsi Banten, pihaknya menargetkan agar seluruh nasabah, khususnya di Kabupaten Lebak sudah mengaktivasi bjb DIGI.

"Harapannya seluruh kepala dan perangkat desa bisa melakukan transaksi perbankan menggunakan aplikasi bjb DIGI seperti transfer antar bank, pembayaran pajak, informasi saldo tabungan dan kredit, info saldo DPLK, pembelian pulsa, top up e-Commerce dan lain-lain," papar Rina.

**Baca juga: <u>Vaksin Booster Kedua Mulai Diberikan kepada Nakes</u> <u>di Lebak</u>

Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Lebak periode 2022-2027 dilantik hari ini. Usep Pahlaludin bersama jajaran pengurus akan dilantik oleh DPD Apdesi Provinsi Banten. Pelantikan sekaligus stadium general dibuka Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Tokoh nasional Mulyadi Jayabaya (JB) juga nampak hadir di acara tersebut.

Mantan bupati Lebak dua periode yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasihat Apdesi Lebak. JB meminta Apdesi bersatu membantu pemerintah daerah untuk membangun Lebak menjadi kabupaten yang maju.(Nda)

Desa Ingin Pindah Rekening

dari BJB ke Bank Banten, DPMD Lebak: Boleh Aja, Asal…

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak mempersilahkan apabila desa ingin memindahkan rekening kas umum desa (RKUDes) dari Bank BJB ke bank lain.

Namun, DPMD mewanti-wanti, bank yang dipilih harus sudah memiliki sistem yang dapat memberi kemudahan layanan terhadap transaksi pemerintah desa maupun perangkatnya.

"Sah-sah aja, silahkan mau ke Bank Banten, atau ke BRI, tapi kami menyarankan sistem di bank itu minimal bisa bantu perangkat desa. Contoh soal begini kalau dialihkan ke Bank Banten kan unsur pelayanan dan sistemnya itu ketinggalan, kalau BJB kan sekarang sudah pakai Sitanti," kata Babay, kepada Kabar6.com, Selasa (22/6/2022).

Babay tak ingin, desa mengalihkan layanan transaksi keuangannya ke bank yang secara sistem justru belum mumpuni dalam memberikan kemudahan layanan kepada pemerintah desa dan perangkatnya.

"Kita kan mau jadi desa maju dan mandiri. Kalau masih di bank itu (BJB), orang Cikotok mau gajian ngambil uang kan tinggal melangkah di Cibeber ada, tapi seandainya ke Bank Banten untuk sementara sekarang lho ya, yang dari Cibeber harus jauh ke Malingping. Ini yang menurut kami memudahkan aparatur desa," beber Babay.

**Baca juga: DPRD Lebak Soal Desa Pindah Rekening dari BJB ke
Bank Banten: Wajar, Sangat Mendukung

"Kalau sekarang kita alihkan kemudian di sana nya masih tertinggal sistemnya, ya mungkin kayak sekian puluh tahun ke belakang dong. Boleh saja, tapi sistemnya diperbaiki," sambung dia.

Kabar6.com masih berupaya meminta tanggapan kepada pihak Bank Banten Cabang Rangkasbitung.

Salah seorang manajer di Bank Banten Rangkasbitung, mengaku, akan berkoordinasi dengan sekretariat perusahaan saat dikonfirmasi terkait alasan BJB Rangkasbitung yang tidak autodebet gaji angsuran kredit kepala desa di Bank Banten.

"Bukan domain saya untuk kasih tanggapan, nanti koordinasi dulu dengan sekretariat perusahaan ya," katanya.(Nda)

Alasan BJB kenapa Rekening Desa Tak di Bank Banten

hingga soal CSR yang Ditanya Apdesi Lebak

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Pemerintah desa di Kabupaten Lebak menginginkan rekening kas umum desa (RKUDes) dipindah dari BJB ke Banten.

Selain RKUDes, pemerintah desa yang tergabung dalam Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tak jelas hingga tidak autodebet-nya gaji kepala desa yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

Manager Operasional BJB Kantor Cabang Rangkasbitung Rina Triana kepada Kabar6.com memberikan keterangan tertulis berisi tanggapan mengenai sejumlah permasalahan yang ditanyakan Apdesi, Sabtu (18/6/2022).

Dalam keterangan tertulisnya, BJB menyampaikan alasan mengapa RKUDes harus tetap di BJB dan tidak di Bank Banten.

"BJB sedang melakukan percepatan perluasan digitalisasi untuk mendukung Kabupaten Lebak menjadi kota digital sesuai dengan SK Bupati tentang TP2DD. Di mana seluruh transaksi di pemerintah daerah, kecamatan, desa harus sudah digital, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran perbankan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran," tulis BJB dalam keterangan tersebut.

Saat ini, BJB dan DPMD telah membangun sistem digital, di mana aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh desa telah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara online ke internet banking corporate. Dengan ini, desa dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus datang ke bank, dan transaksi yang dibelanjakan langsung tercatat di aplikasi Siskeudes untuk memudahkan monitoring di desa, kecamatan dan DPMD.

"Alhamdulillah sudah 3 tahun desa menggunakan transaksi internet banking corporate tidak ada keluhan, bahkan dipermudah transaksinya," katanya.

Terkait dengan tidak autodebet-nya angsuran kredit para kades di Bank Banten, BJB beralasan karena Bank Banten belum memberikan daftar siapa saja kades yang akan dipotong gajinya dan berapa nominalnya.

"Padahal kami sudah meminta berkali-kali kepada pimpinan cabang Bank Banten Rangkasbitung," tulis BJB.

Bank yang berkantor pusat di Bandung ini menyampaikan, rekening yang dituju untuk rekanan pemdes menggunakan rekening yang sama dengan bank RKUDes (BJB). Hal tersebut lantaran ada biaya transfer jika transaksi ke bank lain yang dibebankan kepada penerima.

**Baca juga: <u>Sejumlah Jurus Dinas PUPR Lebak Cegah Banjir dan</u> <u>Longsor</u>

Kemudian terkait CSR yang dipertanyakan Apdesi, Rina menyebut tidak ada CSR yang disalurkan untuk operasional.

"Salah atuh nanti jadi temuan audit, mungkin untuk pembangunan

gedung. Untuk CSR kami sudah salurkan untuk pembangunan mulai dari studio musik, sekolah rusak, hingga panti asuhan, dan yang terakhir untuk banjir bandang dan gempa," beber Rina.(Nda)

DPRD Lebak Soal Desa Pindah Rekening dari BJB ke Bank Banten: Wajar, Sangat Mendukung

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Enden Mahyudin, menganggap wajar keinginan pemerintah desa memindahkan

rekening umum kas desa (RKUDes) dari BJB ke Bank Banten.

"Saya kira wajar ya, karena teman-teman Apdesi merasakan ada yang ribet terkait pelayanan administrasi perbankan di BJB," kata Enden kepada Kabar6.com, Kamis (16/6/2022).

Enden menyebut, salah satu masalahnya adalah, BJB tidak melakukan auto debet terhadap gaji kepala desa (Kades) yang mempunyai kredit ke Bank Banten. Hal itu menyebabkan kades memiliki tunggakan kredit.

"Iya kan ada kades yang punya kredit ke Bank Banten, seharusnya kan lebih praktis tinggal auto debit jadi kepotong langsung gaji untuk kredit, tapi kan ini jadinya harus manual, dan ada beberapa akibat ini jadi punya tunggakan dan sampai ditagih ke rumah oleh pihak bank," papar Enden.

Terkait Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipertanyakan Apdesi, politisi PDI Perjuangan ini juga menilai wajar. Apdesi ujar Enden, membandingkan dengan Apdesi di Jawa Barat yang bisa sampai membangun sekretariat.

"Selama ini desa bermitra dengan BJB, tapi tidak pernah merasakan itu (CSR). Menurut saya wajar diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan," ucap Enden.

**Baca juga: 290 Calon Jemaah Haji Lebak Dilepas, Kemenag: Jaga Kesehatan, Semoga Jadi Haji Mabrur

Dia mendukung jika desa ingin memindahkan RKUDes dari BJB ke Bank Banten juga dengan alasan Bank Banten perlu didorong supaya tumbuh dan menjadi lebih berkembang.

"Sangat mendukung, dan di dalam pertumbuhan ekonomi tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat. Secara aturan dari berbagai pihak, perpindahan itu tidak ada masalah, clear boleh. Memang ada surat imbauan Sekda tapi kan itu tidak wajib karena hanya imbauan," kata dia.(Nda)

Pemdes di Lebak Ingin Pindah Rekening dari BJB ke Bank Banten, Apa Alasannya?

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lebak ingin memindahkan pelayanan rekening kas umum desa (RKUDes) dari Bank BJB ke Bank Banten.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin, mengatakan, keinginan pindah RKUDes tersebut bukan tanpa alasan.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemdes kemudian ingin memindahkan RKUDes ke bank daerah yang diresmikan pada tahun 2016 tersebut.

"Ada konteks moralitas yang kami angkat, karena disadari atau

tidak sudah terjadi monopoli. Misal kalau kita belanja untuk ATK (Alat tulis kantor) atau material untuk pembangunan itu harus ke toko atau penyedia yang punya rekening yang sama, yaitu BJB, ini kan sudah merampas kebebasan hak individu," kata Usep kepada Kabar6.com, Kamis (16/6/2022).

Kemudian yang juga dikeluhkan adalah, ungkap Usep, BJB yang tidak melakukan auto debet terhadap gaji kepala desa (Kades) yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

"Seharusnya kan bisa auto debet, jadi ketika gaji kades masuk bisa langsung secara otomatis untuk dibayarkan angsuran kredit ke Bank Banten, tapi BJB tidak melakukan itu," sebut kepala Desa Sangiang Jaya ini.

Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) bank yang berkantor pusat di Jawa Barat tersebut. Padahal kata Usep, setiap tahunnya sekitar Rp340 miliar dana desa disimpan di bank tersebut.

"Tahun ini sekitar 380 miliar tapi mana bentuk kepedulian BJB ke kami, tidak ada, tidak jelas. Kalau kita bandingkan dengan di daerah Jawa Barat, secara khusus bisa memberikan CSR sebesar Rp1 miliar untuk menunjang operasional kepada Apdesi," beber Usep.

**Baca juga: <u>1.585 CPNS dan PPPK di Lebak Segera Bertugas</u>

Memindahkan RKUDes ke Bank Banten, sambung Usep, juga bagian dari bentuk nyata komitmen pemdes di Lebak dalam mendukung program pembangunan daerah.

"Kita tentu bangga bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalu bank milik daerah sendiri. Jadi jelas ya kami punya alasan konkret supaya ini tidak terlalu dimonopoli, karena di daerah lain pun bebas saja setiap tahun bisa berganti, enggak ada masalah," jelas Usep.(Nda)

BJB Klaim Transaksi Digital Pajak Daerah Transparan dan Akuntabel

written by Redaksi | 25 Juli 2024



Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mendorong transaksi penerimaan pajak daerah non tunai diperluas. BJB selaku jasa perbankan penerima kas daerah mesti siapkan aplikasi m-banking untuk hindari pertemuan langsung antara petugas dengan wajib pajak.

CEO Regional 4 BJB, Edi kurniawan Saputra menuturkan, jika lembaganya telah membina hubungan kemitraan sejak awal

pemekaran daerah. Pihaknya berkomitmen akan mendukung Pemkot Tangsel dalam mewujudkan proses digitalisasi melalui transaksi non tunai.

"Kami berkomitmen proses digitalisasi ini menciptakan transaksi keuangan yang transparan, akuntabel dan transparan," ungkapnya di Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Senin (15/11/2021).

Di lokasi yang sama, Deputi Direktur Informasi Dokumentasi, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, FA Purnamajaya mengatakan, pihaknya mendukung perbankan bertransformasi ke arah digital.

Jasa perbankan mempermudah untuk dapat memberikan produk digital nasabah dan pemangku kepentingan termasuk mendukung pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

**Baca juga: <u>Apresiasi Setu Soal Pengelolaan Sampah, Pilar</u> <u>Ajak Kecamatan Lain Lakukan Hal Sama</u>

"OJK mendukung penuh agar perbankan dapat berkontribusi secara aktif dan inovatif dalam mengembangkam produk yang dapat mendukung TP2DD di Tangsel," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Purnamajaya, perbankan juga diminta tetap memperhatikan prinsip manajemen resiko dan teknologi yang memadai bagi nasabah.(yud)